

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah Indonesia, yakni sekitar 270,20 juta jiwa. Jumlah tersebut hadir dikarenakan luasnya wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan dan daratan, namun dengan luasnya wilayah Indonesia telah menjadialah satu tantangan bagi terwujudnya amanat yang tercantum di UUD 1945 dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan umum dan tercapainya kecerdasan bagi kehidupan bangsa dan negara.



Bps mencatat Kondisi kesengsaraan yang muncul di beberapa wilayah khususnya di Indonesia merupakan salah satu penyebab utama dan berhubungan erat dengan kesejahteraan umum. Berbagai ikhtiar telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, diantaranya dengan melakukan pemberian bantuan social seperti:

- a. Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- b. Program Beras bagi Rakyat Miskin (BERASRASKIN)
- c. Bantuan dalam bidang Sekolah / Pendidikan
- d. Berobat Gratis
- e. Pengadaan Rumah Rakyat
- f. Pengembangan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)
- g. Pengadaan Pupuk Ekonomis
- h. Bantuan bagi Nelayan secara Tunai
- i. Kenaikan Gaji PNS
- j. J. Penambahan dalam Kesentosaan bagi Buruh
- k. Dukungan bagi Penyandang Kecacatan
- l. Program Bidik Misi
- m. Program KIS



- n. Program KIP
- o. Program KKS
- p. Program Keluarga Harapan (PKH)

Rancangan program yang dijelaskan di atas adalah bukti usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencedaskan kehidupan bangsa. Program yang saat ini di jalankan oleh pemerintah merupakan program keluarga harapan , program yang telah di jalankan semenjak tahun 2007 dan focus bantuan PKH diberikan terhadap keluarga yang memiliki latar belakang dengan kondisi sengsara, bahaya dan telah tercantum dalam data terpadu. Sementara, rancangan bagi penanganan fakir miskin yang mencakup berbagai sektor diantaranya kesehatan khususnya bagi ibu hamil atau menyusui, anak dengan usia nol hingga enam tahun. Sementara itu, tolak ukur untuk tingkat Pendidikan mencakup kriteria, anak dengan bangku pendidikan Sekolah Dasar dan sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat, Sekolah Menengah Atas dan sederajat, dan bagi anak berumur 6 hingga 21 tahun yang belum menuntaskan program wajib belajarnya selama 12 tahun. Terhitung dari 2016 terdapat tingkat pertumbuhan bagi tolak ukur kesejahteraan sosial dengan syarat, lanjut usia dan diutamakan bagi lansia dengan usia 60 tahun ke atas, dan penyandang disabilitas berat.

Pemerintah Indonesia mempunyai beberapa bentuk kesejahteraan dan kemiskinan; diantaranya adalah Badan Pusat Statistik yang berguna untuk melihat kemiskinan dengan fokus utamanya adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang fokus utama badan ini merupakan kesejahteraan bagi

keluarga. Berdasarkan istilah lain juga dijelaskan bahwa “Kesengsaraan keluarga merupakan sebuah kondisi dimana individu atau kelompok kekurangan bahkan tidak dapat mencukupi keperluan dasarnya, disisi lain, lingkungan sekitarnya kurang peduli untuk menyediakan kesempatan bagi individual tersebut guna memperbaiki taraf hidup bagi dirinya.” Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwasanya kemiskinan yang lahir dalam suatu keluarga dapat ditangani apabila terdapat bantuan yang cukup.

Kemiskinan atau kesengsaraan merupakan isu multidimensi yang erat kaitannya atasketidakmampuan seseorang dalam mengakses ekonomi, sosial, dan politik yang mempuni.

Kesengsaraan juga menyebabkan penghambatan pembangunan bagi sebuah negeri, dan akan menyebabkan ketidak terpenuhinya hak yang dimiliki sebagai warga negara. Dampak lain yang muncul dari kesengsaraan yaitu bersifat meluas atau multiplier effect yang akan berdampak bagi tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh baik di INDONESIA maupun di dunia angka kemiskinan setiap tahun mengalami perubahan. Khususnya di indonesia menurut kemendikbut dari tahun 2012 sampai 2019 mengalami penurunan karena presentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya.

Bukti lain dapat dianalisis dari data yang dimiliki oleh Badan pusat statistik (BPS) yang menunjukkan secara umum, dalam kurun waktu 2013 hingga Maret 2020, angka kemiskinan di Indonesia mengalami konidisi penurunan angka kemiskinan, baik dari segi jumlah maupun persentase, dikecualikan pada Maret

2015 angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan. Tingkat pertumbuhan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun tersebut dipicu oleh beberapa



faktor salah satunya adalah, kenaikan harga kebutuhan pokok yang merupakan imabs dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan angka kemiskinan dari tahun 2013 hingga Maret 2020 ditunjukkan pada diagram grafik batang dan tabel penduduk miskin di indonesia :

Tahun	Persentase (%)	Jumlah penduduk miskin
2013	11,36 %	28,25 juta
2014	11,25 %	28,28 juta
2015	11,22 %	28,59 juta
2016	11,46 %	28,01 juta
2017	10,64 %	27,77 juta
2018	9,82 %	25,95 juta
2019	9,41 %	25,14 juta
2020	9,78 %	26,42 juta

(Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021)

Salah satu strategi khusus yang telah dibentuk guna menanggulangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan pengintegrasian program kemiskinan, tepatnya melalui penyelesaian jaminan sosial dengan pendekatan siklus kehidupan sehari-hari. Penerima akan mendapatkan keuntungan yang memadai, karena merupakan struktur tujuan tunggal untuk melakukan semua mediasi kebutuhan yang mencakup, dan memberdayakan peningkatan administrasi satu atap serta melaksanakan bantuan sosial nontunai. (Kementrian PPN/Bappenas, 2017).

Contoh strategi yang diterapkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Wajib pajak mendukung inisiatif yang menguntungkan orang miskin, yang seharusnya bekerja pada bantuan materi pemerintah dan mengalahkan kemiskinan di kemudian hari, dapat menaklukkan kebutuhan. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah meluncurkan berbagai Program Rumah Harapan (PKH) mulai sekitar tahun 2007 yang seharusnya bisa tuntas dan bisa dilaksanakan. Lanjutkan, pada dasarnya hingga 2015. Tahun 2007 adalah fase transformasi yang mendasari proyek, yang juga dikenal sebagai tahap percontohan. Pada tahun 2007, program ini juga diujicobakan di tujuh provinsi, antara lain:a)

- a) DKI Jakarta
- b) Gorontalo
- c) Jawa Barat
- d) Jawa Timur
- e) Sulawesi Utara
- f) Sumatra Barat
- g) Nusa Tenggara Timur

PKH yang telah dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Rezim/Kota dan Promotor PKH. Semua orang berperan penting dalam kemajuan program PKH. UPPKH Fokal - adalah badan untuk kesiapan dan pelaksanaan standarisasi standar dan proyek. UPPKH fokus saling menyaring perbaikan di tingkat teritorial dan memberikan bantuan penting. UPPKH Daerah/Kota - Menerapkan rancangan dan menjamin kelancaran arus informasi yang didapat dari daerah hingga menengah. UPPKH Kabupaten/Kota juga berperan dalam mengawasi dan mengamati presentasi fasilitator dan memberikan bantuan bila diperlukan.

Sekutu adalah pertemuan kunci yang menghubungkan penerima dengan mitra yang berbeda di tingkat jalan dan proyek di tingkat wilayah/kota. Usaha co-organisasi menggabungkan mengumpulkan, mengawasi dan membantu penerima dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Alasan sahnya Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program dalam menyampaikan bantuan sosial yang bersifat restriktif. bagi keluarga miskin dan lemah yang telah terdaftar dalam koordinasi informasi penanganan masyarakat miskin, juga didistribusikan oleh titik fokus aset dan data.

kesejahteraan sosial dan diterapkan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan data yang saya peroleh dari satu kecamatan cimencyan yang menaungi 7desa dan 2 kelurahan yaitu :

- Kantor Desa
  - a. Kantor Desa Ciburial
  - b. Kantor Desa Cikadut

- c. Kantor Desa Cimenyan
  - d. Kantor Desa Mandalamekar
  - e. Kantor Desa Mekarsaluyu
  - f. Kantor Desa Mekarmanik
  - g. Kantor Desa Sindanglaya
- Kantor Kelurahan
    - a. Kelurahan Cibenyng
    - b. Kelurahan Padasuka

Desa merupakan sebuah kawasan administratif dalam pengawasan kecamatan yang di dalamnya memiliki kelompok perumahan yang terbesar dan membentuk sebuah wilayah dan sering disebut dengan kampung atau dusun, wilayah ini dikoordinir oleh seorang kepala desa. Sementara, kelurahan merupakan sebuah wilayah administrative dalam pengawasan kecamatan yang terdiri dari kumpulan rukun warga (RW) dan dikoordinir oleh seorang lurah. Dismilaritas dari desa dan kelurahan yang mencolok adalah dalam aspek prinsip yan terletak dalam manajemen pengelolaan wilayah dan masa tugasnya. Seperti yang telah dipahami secara umum, desa bias'anya dikoordinir oleh seorang kepala desa yang terpilih dengan melalui pemungutan suara, sementara kelurahaan biasanya dikepalai dengan seorang lurah yang langsung disarankan oleh Bupati atau pun Walikota.

Program Keluarga Harapan (PKH) terhitung sejak 2007 sangat diharapkan

dapat diimplementasikan secara berkesinambungan. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan 8 kelurahan 270 desa . saya mengambil 1 desa cimenyan , fokus penelitian saya yaitu di desa cimenyan di karenakan kawasan ini notabene bermata pencaharian sebagai buruh dan sebagai petani sayuran. Buruh hanya berpenghasilan 100rb/hari. Sedangkan petani setiap 3 bulan sekali di musim penghujan, jika musim kemarau tiba petani dan buruh menganggur.

Berdasarkan latar belakang pendidikan , penduduk desa cimenyan kebanyakan hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP) namun sebagian lainnya hanya sampai sekolah dasar (SD). Latar belakang ekonomi di kawasan cimenyan yang bermata pencaharian sebagaiburuh dan petani yang berpenghasilan kurang dari 100 ribu/hari, kadang petani merugi di kala harga sayuran murah sehingga penghasilan tidak sebanding dengan modal yang di keluarhan sehingga dapat di simpulkan bahwa sebaian masyarakat masih jauh dari kata sejahtera.

Isu yang diuraikan, telah menimbulkan dorongan bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul sebagai “ **EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU UNTUK MENINGKATKAN TARAP HIDUP MASYARAKAT DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG** ”

## **B. Identifikasi Masalah**

Masalah yang dihadapi dalam sebuah upaya ke efektifan terhadap program bantuan social(PKH) dalam mengatasi kemiskinan.

Pendataan partisipan dalam memperoleh bantuan sosial (PKH) belum sesuai pada target, masih banyak keluarga tidak mampu yang masih belum mendapatkan bantuan tersebut.

Terjadi kecemburuan social antara masyarakat partisipan rancangan keluarga harapandengan masyarakat bukan partisipan keluarga harapan(PKH). Penyaluran dana dan program keluarga harapan (PKH) di wilayah kecamatan Cimenyan belum tepat sasaran.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah tujuan program keluarga harapan sudah tepat sasaran ?
2. Apakah kebijakan program keluarga harapan sudah terlaksana dengan baik?
3. Apakah Perencanaan program keluarga harapan sudah terlaksana dengan baik?
4. Apakah penyelenggaraan program keluarga harapan sudah Efektif/Efisien?
5. Bagaimana usaha pengawasan/pengendalian program keluarga harapan di desa cimenyan?
6. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ?
7. Bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan program PKH ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
2. Mengkelompokan masalah yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diciptakan untuk memberikan manfaat kepada para pemegang keputusan dalam pemerintah baik daerah ataupun pusat, dan melihat seberapa efektif kegiatan tersebut khususnya di wilayah Cimenyan Bagi para masyarakat khususnya penerima bantuan tersebut.

### **F. Kerangka Pemikiran**

Bentuk Konsep Penelitian merupakan sebuah kerangka dalam hubungan dan konsep yang akan diobservasi atau dianalisis melalui kegiatan penelitian. Konsep juga merupakan sebuah abstraksi atau penjelasan yang digambarkan dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Harapannya adalah konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berbagai variable. Berdasarkan penjelasan tersebut, Kemudian tentang efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan. Konsep tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

(Siagian 2008;77) mengungkapkan Efektivitas adalah produksi barang dalam jumlah besar untuk layanan yang diberikan oleh kegiatan dengan menggunakan sumber daya sarana dan prasarana yang telah diidentifikasi sebelumnya secara sadar. Efektivitas berarti sukses sebuah tujuan yang telah di targetkan. Efektivitas program adalah sebuah cara yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu program berjalan di lapisan masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah diharapkan.. Ada beberapa indikator penilaian ke efektifan sebuah program dapat dilihat dari :

#### 1. Tujuan

Tujuan adalah suatu target pencapaian yang guna mengarahkan jalannya suatu perencanaan kegiatan. Tujuan penelitian ini adalah melihat seberapa efektifkah program pkh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu dan melihat peran pemerintah dalam pelaksanaan program Pkh ini.

## 2. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan dari pemerintah yang di buat dalam pelaksanaan program keluarga harapan masih kurang maksimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari program PKH.

## 3. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus di lakukan guna tercapainya tujuan yang di harapkan. Dalam perencanaan program pkh ada kegiatan pengarahan mengenai berwira usaha dan pemanfaatan bantuan pkh untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

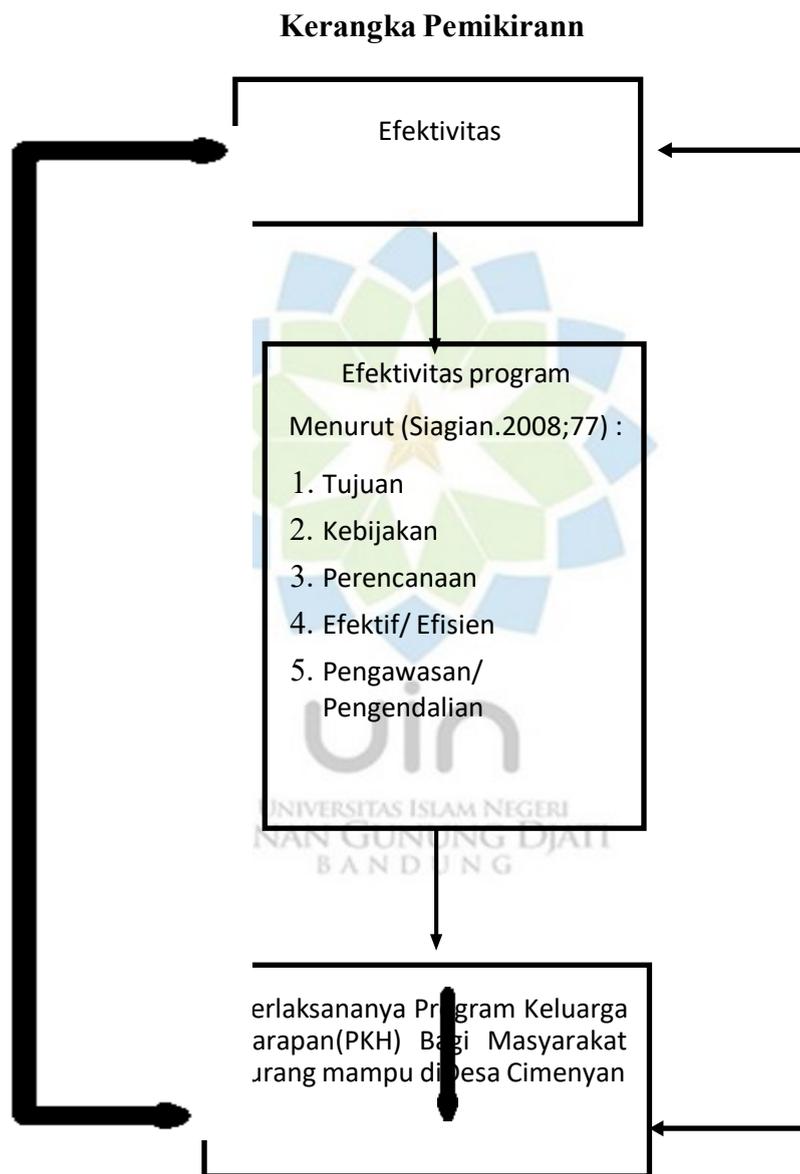
## 4. Efektif/Efisien

Efektif adalah sebuah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yg telah tercapai. Dan Efisien adalah ukuran ketepatan waktu yang di gunakan dalam sebuah kegiatan. Seberapa efektif dan efisien kah program pkh yang telah di laksanakan dalam usaha pengentasan kemiskinan .

## 5. Pengawasan/Pengendalian

Manajemen adalah suatu rangkaian latihan seseorang untuk menjamin

bahwa pelaksanaan latihan sesuai dengan rencana dan tujuan yang masih belum jelas. Pengawasan dan pengendalian program pkh di lakukan oleh mentri sosial dan budaya, dinas sosial dan budaya , kordinator kecamatan , dan pendamping peserta pkh di desa atau kelurahan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG